

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019-2023

Narazsyah Belza Putri Mochamad¹, Arie Pratama², Khairanis Yulita M.A.³

Manajemen, Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia

narazsyah21001@mail.unpad.ac.id, arie.pratama@unpad.ac.id, khairanis.yulita@unpad.ac.id**Abstract**

Disparities and inequalities have emerged among the regencies and city in the Special Region of Yogyakarta (DIY) Province. The regional revenue sources of the five regencies/city derived from Local Own-Source Revenue (PAD) remain relatively low and fluctuate, causing transfer revenues to continue dominating regional financing. This study aims to provide an overview of the financial performance of these five local governments in managing their finances and to offer recommendations for promoting equitable development across the province. The research employs a mixed-method approach, combining descriptive quantitative analysis with interviews. The data analysis techniques include financial ratio analysis, trend analysis of increases and decreases, and qualitative data from interviews. The financial ratios used are the Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, PAD Growth Ratio, Regional Financial Dependency Ratio, and Fiscal Decentralization Degree Ratio for the years 2019-2023. The research objects include the City of Yogyakarta, and the Regencies of Sleman, Bantul, Kulon Progo, and Gunungkidul. The findings show that the City of Yogyakarta has the highest financial independence with a participatory relationship pattern, while Gunungkidul Regency has the lowest with an instructive pattern. The PAD effectiveness and financial dependency across the five regions are categorized as very effective and very high, respectively. The highest PAD growth occurred in Gunungkidul Regency in 2023, while the lowest was in Sleman Regency in 2020. Fiscal decentralization is moderate in Yogyakarta City and Sleman Regency, and low in Kulon Progo and Gunungkidul Regencies. Most regions in DIY still rely heavily on transfer funds; therefore, strategies to strengthen PAD and policy synergy are essential for achieving equitable development. This study contributes to the development of academic knowledge and fiscal policy aimed at enhancing regional independence and sustainable decentralization in the Province of DIY.

Keywords: *Financial Performance, Regional Fiscal Independence, Local Own-Source Revenue (PAD), Financial Ratios, Fiscal Decentralization, Fiscal Dependence, Equitable Development, Special Region of Yogyakarta Province*

Abstrak

Celah, kesenjangan, dan ketimpangan muncul antara kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sumber pendapatan daerah kelima kabupaten/kota yang berasal dari PAD tergolong rendah dan fluktuatif sehingga pendapatan transfer masih mendominasi pembiayaan daerah. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran mengenai kemampuan kinerja kelima kabupaten/kota Provinsi DIY dalam mengelola keuangan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemerataan di Provinsi DIY. Metode penelitian yang digunakan merupakan mix method yang mengombinasikan deskriptif kuantitatif

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah kombinasi analisis rasio keuangan, analisis tren kenaikan dan penurunan, dan hasil wawancara. Rasio keuangan yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2019-2023. Objek yang digunakan meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan Kota Yogyakarta sangat tinggi dengan pola hubungan partisipatif sedangkan Kabupaten Gunungkidul berada di posisi terendah dengan pola instruktif. Efektivitas PAD dan ketergantungan keuangan lima Kabupaten/Kota di DIY sangat efektif dan sangat tinggi. Pertumbuhan PAD tertinggi tahun 2023 oleh Kabupaten Gunungkidul dan pertumbuhan PAD terendah pada tahun 2020 oleh Kabupaten Sleman. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam kategori sedang sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul dalam kategori kurang. Mayoritas daerah di DIY masih bergantung pada dana transfer, sehingga perlu strategi penguatan PAD dan sinergi kebijakan untuk pemerataan pembangunan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan kebijakan fiskal untuk memperkuat kemandirian daerah dan desentralisasi yang berkelanjutan di Provinsi DIY.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan, Pemerataan Pembangunan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya menekankan pentingnya otonomi daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Keuangan daerah memegang peranan penting sebagai cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi fiskalnya. Jensen dan Meckling (1976) melalui teori keagenan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *principal* berhak atas kinerja optimal dari pemerintah daerah sebagai *agent*, namun hubungan ini sering menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan dan asimetri informasi. Tantangan dalam hubungan principal-agent dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat (S. Abdullah & Halim, 2022). Pengukuran kinerja menjadi alat penting untuk menilai pengelolaan sumber daya, pencapaian tujuan, dan mengurangi risiko asimetri informasi serta konflik kepentingan.

Tabel 1 Realisasi PAD Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

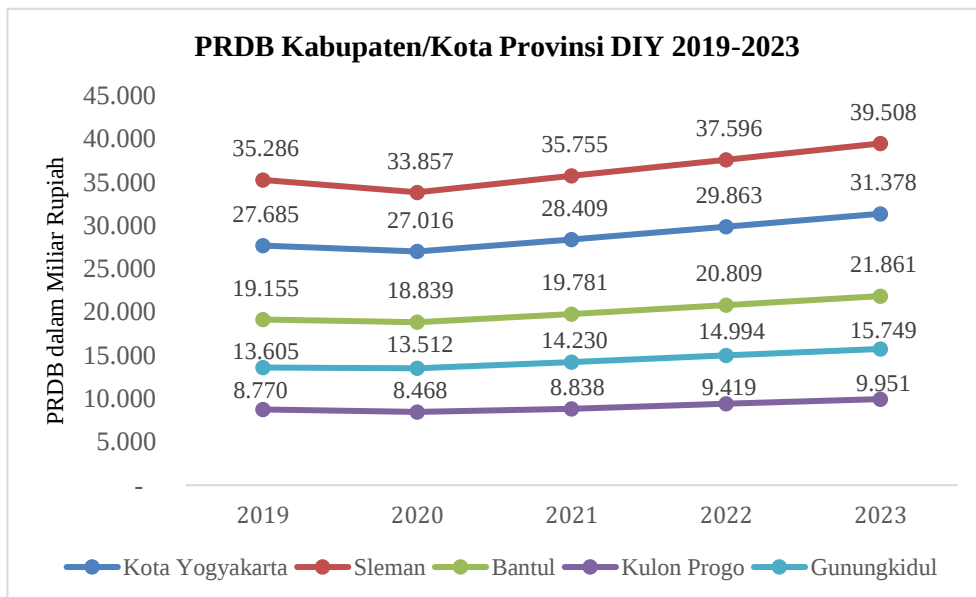
Provinsi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	45.707.400.004	37.414.754.711	41.606.307.406	45.608.404.730	49.139.745.715
Jawa Barat	21.244.266.598	18.521.882.178	20.333.679.966	23.249.622.254	24.375.389.631
Jawa Tengah	14.437.914.236	13.668.282.279	14.695.474.898	16.264.618.854	17.012.509.421
D I Yogyakarta	2.082.795.334	1.876.706.829	1.900.923.075	2.263.431.317	2.368.679.166
Jawa Timur	19.327.125.485	17.950.996.509	18.935.885.925	21.256.651.208	22.317.204.436
Banten	7.022.309.916	5.906.535.161	7.010.370.229	8.203.139.527	8.514.348.394

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki PAD tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki PAD terendah di

antara provinsi di Pulau Jawa sepanjang tahun 2019-2023. Provinsi DIY menempati posisi PAD terendah di antara provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu hanya mencapai Rp2,36 triliun, jauh di bawah provinsi-provinsi lainnya. Meskipun memiliki PAD terendah, DIY menunjukkan peningkatan PAD dari Rp2,08 triliun pada 2019 menjadi Rp2,36 triliun pada 2023. Peningkatan PAD ini mencerminkan pertumbuhan stabil namun lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Gambar 1 PDRB Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul (data diolah, 2025)

Gambar 1 menampilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019 - 2023 terdapat celah, kesenjangan, dan ketimpangan antara Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya, yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Kota Yogyakarta yang seluruh wilayahnya memiliki karakteristik perkotaan ini sebagai pusat pendidikan dan pariwisata memiliki ekonomi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten lainnya, dengan kontribusi signifikan dari sektor jasa dan perdagangan. Namun, meskipun PDRB Kota Yogyakarta meningkat, angka kemiskinan di perkotaan justru mengalami peningkatan di tahun 2019-2021 (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan peningkatan ekonomi tidak merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perbedaan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terlihat nyata, terutama dalam hal kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Kontribusi PAD terhadap TPD seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY berada tidak lebih dari 40%. Artinya, TPD masih didominasi oleh pendapatan transfer. Kota Yogyakarta memiliki kontribusi PAD terhadap TPD tertinggi dengan capaian 40% sedangkan Kabupaten Gunungkidul menjadi yang terendah dengan kontribusi PAD terhadap TPD tidak lebih dari 16%.

Tujuan penelitian ini guna menganalisis dan memberikan evaluasi rasio keuangan di kabupaten/kota Provinsi DIY dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan kinerja kelima kabupaten/kota Provinsi DIY dalam mengelola keuangannya. Aspek yang dikaji mencakup tingkat kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan asli daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan derajat desentralisasi fiskal. Analisis ini memberikan interpretasi terhadap angka-angka laporan keuangan dan mengubahnya menjadi informasi yang mudah dipahami oleh *stakeholders*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) di mana agen bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya milik prinsipal. Konflik kepentingan dapat muncul karena agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya, yang dapat menyebabkan biaya keagenan (agency costs) jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Teori keagenan menekankan pentingnya insentif dan mekanisme pengendalian guna meminimalkan asimetri informasi dan memastikan bahwa kepentingan agen sejalan dengan kepentingan principal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah sangat berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan dan pelayanan serta jika kinerja pemerintahan berjalan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai agen.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah prinsip yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam merumuskan kebijakan dan mengatur sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya dengan adanya otonomi ini. Otonomi daerah bermaksud menggalakkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memaksimalkan potensi lokal melalui pengelolaan yang lebih langsung dengan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki nilai uang, serta segala jenis kekayaan yang mungkin dimiliki daerah sehubungan dengan kewajiban dan hak tersebut. Daerah memiliki kemampuan untuk memungut pajak, retribusi, dan melakukan pinjaman sebagai bagian dari kewenangannya dalam mengelola sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai aset bersih pada tahun fiskal. Pendapatan Daerah mencakup seluruh penerimaan uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah daerah. Penerimaan ini diakui sebagai penambah ekuitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu tahun anggaran. Pemerintah merinci Pendapatan Daerah menurut urusan pemerintahan, struktur organisasi, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan yang menjadi hak daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merujuk pada seluruh penerimaan yang dihasilkan oleh daerah dari sumber-sumber yang berada di wilayahnya sendiri. Pendapatan ini dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan, "Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah." Pendapatan transfer mencakup berbagai bentuk alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun antar daerah guna mendukung keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan, "Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup semua pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, termasuk hibah, dana darurat, dan berbagai pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menjadi beberapa kategori: 1.Hibah 2.Dana Darurat 3.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai seberapa besar akuntabilitas lembaga, badan, atau organisasi dalam menyediakan pelayanan publik dengan kualitas terbaik menggunakan alat penilaian keuangan dan non-keuangan. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada publik mengenai penggunaan dana, termasuk kewajiban untuk menunjukkan bahwa keuangan yang diolah sudah digunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan harapan publik, dan berdampak positif bagi kepentingan publik.

Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah adalah indikator yang dipakai sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Mahmudi (2019) menerangkan bahwa rasio keuangan daerah dapat menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan melalui berbagai rasio, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan desentralisasi fiskal.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah, juga dikenal sebagai otonomi fiskal, mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai layanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan melalui pengumpulan pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh penduduk (Halim & Kusufi, 2014). Kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa mandiri suatu wilayah. Sedangkan rasio ketergantungan digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah masih mengandalkan uang atau dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu sasaran atau tujuan dikatakan efektif apabila berhasil dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan (Hidayati & Ali, 2023). Efektivitas keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah

berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan PAD dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada realisasi PAD. Putra (2018) menjelaskan bahwa pertumbuhan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mempertahankan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dari waktu ke waktu diukur dengan rasio pertumbuhan.

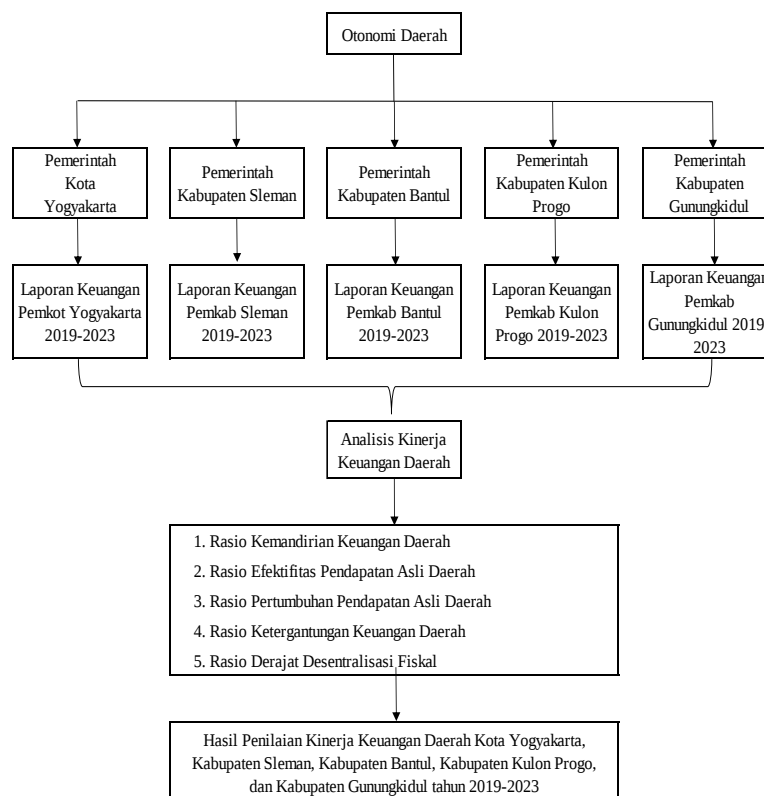
Desentralisasi Fiskal Daerah

Rasio desentralisasi fiskal sebagai indikator pengukur desentralisasi fiskal daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana PAD berkontribusi terhadap keseluruhan pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran (Mahmudi, 2019). Tujuannya adalah untuk mendukung ketahanan fiskal yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Rendahnya ketergantungan pemerintah daerah pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat mencerminkan rasio desentralisasi fiskal yang tinggi (Zulkarnain, 2020).

Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mix method* yang mengombinasikan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan wawancara. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan eksistensi variabel independen, baik satu variabel maupun lebih (Sugiyono,

2023). Data primer diperoleh melalui wawancara, baik secara luring maupun daring, dengan pihak dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Objek Penelitian

Objek penelitian mengacu pada segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti dalam berbagai bentuk untuk diteliti, dengan tujuan memperoleh informasi yang dianalisis untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2023). Penelitian ini dilaksanakan di lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang valid dan relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Tiga teknik utama yang digunakan meliputi:

1) Dokumentasi

Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa metode dokumentasi dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan data dari dokumen, arsip, laporan, dan keterangan yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi data dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang diterbitkan oleh pemerintah.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan dan pengumpulan data di mana pewawancara eksplisit menanyakan berbagai hal kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023).

3) Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang mengaitkan tinjauan kepustakaan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2023).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat (Efriyanto *et al.*, 2023). Kriteria yang digunakan untuk penilaian rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

Gambar 3 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	>75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Kepmendagri No. 690.900.327 /1996), (Halim, 2007)

Rasio ketergantungan keuangan daerah mengindikasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Kriteria yang digunakan untuk penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah sebagai berikut:

Gambar 4 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria Rasio Ketergantungan	Persentase Ketergantungan (%)
Sangat Rendah	00,00 – 10,00
Rendah	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Tinggi	40,01 – 50,00
Sangat Tinggi	>50,00

Sumber: (Kepmendagri No.690.900.327,1996), (Tim Litbang Depdagri-Fisipiol UGM 1991)

2. Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas keuangan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target PAD yang telah ditetapkan (Amal & Wibowo, 2022). Kriteria yang digunakan untuk penilaian rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Gambar 5 Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas PAD	Persentase Efektivitas PAD (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	>90% - 100%
Cukup Efektif	>80% - 90%
Kurang Efektif	>60% - 80%
Tidak Efektif	≤60%

Sumber: (Kepmendagri No.690.900.327,1996), (Halim 2007)

3. Pertumbuhan Keuangan Daerah

Pertumbuhan keuangan daerah mengukur tingkat pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun (Amal & Wibowo, 2022). Pertumbuhan keuangan daerah dapat dinilai menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, yang mana rasio bertujuan untuk mengukur tingkat pertumbuhan PAD dari periode ke periode.

4. Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal daerah mengukur sejauh mana PAD mampu membiayai total belanja daerah (Mataris & Digdowiseiso, 2022). Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan indikator untuk mengukur desentralisasi fiskal daerah. Rasio ini menjabarkan tingkat kemampuan daerah dalam melangsungkan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer (Mardiasmo, 2018). Kriteria yang digunakan untuk penilaian rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Gambar 6 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria Derejat Desentralisasi Fiskal
0% – 10%	Sangat Kurang
10% – 20%	Kurang
20% – 30%	Cukup
30% – 40%	Sedang
40% – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipiol UGM 1991

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis untuk mengolah dan menyederhanakan data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Perbandingan laporan keuangan antar tahun digunakan untuk melihat perubahan dan pola perkembangan kinerja keuangan. Teknik wawancara, baik luring maupun daring, digunakan untuk menggali informasi kualitatif guna mendukung analisis kuantitatif. Kombinasi analisis laporan keuangan dan wawancara memperkaya pemahaman terhadap dinamika kinerja keuangan yang diteliti. Berikut uraian teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Menghimpun data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan Pemerintah Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019-2023 hasil audit.
- 2) Mengklasifikasikan LRA tahunan Pemerintah Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019-2023 agar sesuai dengan data yang diperlukan dalam formulasi perhitungan analisis.
- 3) Menghitung data menggunakan teknik analisis rasio keuangan pada komponen pendapatan daerah menggunakan:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- c. Rasio Pertumbuhan PAD

$$PPAD = \frac{PAD(n) - PAD(0)}{PAD(0)} \times 100\%$$

- d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- e. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- 4) Menganalisis tren kenaikan atau penurunan rasio keuangan beserta faktor pendukung dan penghambat kenaikan atau penurunan tersebut baik dari pihak internal Pemerintah Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta maupun eksternal berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun anggaran 2019-2023 dan sumber lainnya. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2023.
- 5) Melakukan wawancara untuk mendukung hasil kuantitatif dengan pejabat terkait, yaitu kepala bidang akuntansi dan pelaporan BKAD Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, dan Kab. Gunungkidul. Wawancara bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi rasio keuangan, tantangan yang dihadapi daerah dalam meningkatkan PAD, serta kebijakan yang telah diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.
- 6) Menyusun kesimpulan dan rekomendasi dari data kuantitatif dan hasil wawancara terkait strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi PAD, serta kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kinerja Keuangan antar Kabupaten/Kota

Tabel 2 Kinerja Keuangan Kab/Kota Provinsi DIY Tahun 2019-2023

(dalam %)						
Tahun	Daerah	RKKD	RKetKD	Ef. PAD	Pert. PAD	RDFF
2019	Kota Yogyakarta	64,08	60,89	105,52	3,23	39,02
	Kab. Sleman	54,36	62,95	107,61	8,7	34,22
	Kab. Bantul	29,88	74,3	108,3	9,35	22,29
	Kab. Kulon Progo	18,27	77,74	102,8	12,71	14,22
	Kab. Gunungkidul	14,21	84,89	110,14	12,26	12,06
2020	Kota Yogyakarta	50,92	65,07	118,09	-18,27	33,13
	Kab. Sleman	48,74	63,64	116,48	-18,91	31,02
	Kab. Bantul	31,12	73,23	113,98	-5,2	22,79
	Kab. Kulon Progo	19,81	80,68	116,95	6,96	16,08
	Kab. Gunungkidul	15,29	83,24	104,37	-10,44	12,73
2021	Kota Yogyakarta	55,45	63,18	116,14	6,21	35,03
	Kab. Sleman	40,83	70,47	104,28	1,96	28,77
	Kab. Bantul	29,69	74,08	110,85	2,51	21,99
	Kab. Kulon Progo	24,1	78,19	124,56	20,73	18,85
	Kab. Gunungkidul	14,12	87,2	101,95	3,58	12,31
2022	Kota Yogyakarta	62,32	61,61	114,41	21,31	38,39
	Kab. Sleman	54,73	64,49	102,9	32,03	35,3
	Kab. Bantul	31,57	75,73	103,79	9,54	23,91
	Kab. Kulon Progo	25,35	79,44	116,17	3,33	20,14
	Kab. Gunungkidul	18,78	83,95	111,79	32,64	15,77
2023	Kota Yogyakarta	67,37	59,75	115,83	10,99	40,25
	Kab. Sleman	58,14	63,04	103,79	6,51	36,65
	Kab. Bantul	32,41	75,02	108,93	8,67	24,31
	Kab. Kulon Progo	23,76	80,42	105,06	5,16	19,11
	Kab. Gunungkidul	16,23	85,77	103,77	-11,55	13,92

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta selama periode tahun 2019 hingga 2023 secara konsisten menunjukkan kinerja terbaik dalam hal rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Kota Yogyakarta berhasil meningkatkan rasio kemandirian dari 64,08% pada tahun 2019 menjadi 67,37% pada tahun 2023. Peningkatan tersebut mencerminkan kemampuan Kota Yogyakarta dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara relatif independen melalui PAD. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Gunungkidul mencatatkan rasio kemandirian terendah, yaitu sebesar 14,21% pada tahun 2019 dan hanya meningkat menjadi 16,23% pada tahun 2023, dimana masih dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Rendahnya tingkat kemandirian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2019 hingga 2023 memiliki tingkat ketergantungan keuangan (RKetKD) terhadap dana transfer dengan kategori sangat tinggi, yaitu diatas 59%. Ketergantungan fiskal daerah terlihat sangat tinggi pada Kabupaten Gunungkidul, yang rasio ketergantungannya mencapai 87,20% pada tahun 2021, naik dari 84,89% pada tahun 2019. Peningkatan ini berarti sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Sebaliknya, Kota Yogyakarta menunjukkan ketergantungan paling rendah sebesar 59,75% pada tahun 2023, meskipun angka tersebut tetap menunjukkan dominasi pendapatan transfer. Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo berada dalam kisaran ketergantungan yang sangat tinggi pula, yaitu rata-rata di atas 70%, menandakan bahwa ketergantungan fiskal masih menjadi tantangan utama di seluruh wilayah Provinsi DIY.

Rasio efektivitas PAD seluruh kabupaten/kota menunjukkan kinerja yang positif dengan kriteria sangat efektif karena seluruh nilai rasio berada di atas 100% selama lima tahun terakhir. Kota Yogyakarta mencatat efektivitas tertinggi sebesar 118,09% pada tahun 2020, meskipun tahun tersebut merupakan masa krisis akibat pandemi covid-19. Kabupaten Kulon Progo bahkan mencapai efektivitas PAD tertinggi sebesar 124,56% pada tahun 2021. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa target PAD berhasil terlampaui dan mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut PAD secara optimal.

Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan fluktuasi yang tajam selama periode lima tahun. Tahun 2020 menjadi masa terberat, dengan pertumbuhan PAD negatif di hampir seluruh daerah akibat pandemi covid-19. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mengalami penurunan terbesar, masing-masing sebesar -18,27% dan -18,91%. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022, ketika Gunungkidul dan Sleman mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 32,64% dan 32,03%. Namun, pertumbuhan negatif kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 sebesar -11,55%, yang mencerminkan belum stabilnya kinerja PAD di daerah tersebut.

Rasio derajat desentralisasi fiskal (RDDF) menunjukkan peran PAD dalam mendukung total pendapatan daerah. Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan tingkat desentralisasi fiskal tertinggi, yaitu 40,25% dengan kategori baik pada tahun 2023. Artinya, hampir setengah dari pendapatan daerah berasal dari PAD, mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul mencatat RDDF terendah sebesar 13,92% dengan kategori kurang pada tahun yang sama, yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil. Kabupaten Bantul dan Kulon Progo juga berada pada level desentralisasi fiskal yang rendah, di bawah 25%. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui strategi yang terencana dan berkelanjutan menjadi kunci peningkatan kemandirian fiskal di kabupaten-kabupaten tersebut.

Pembahasan Analisis Tren Kinerja Keuangan

Tren kinerja keuangan Kota Yogyakarta selama 2019-2023 menunjukkan arah positif dengan peningkatan kemandirian fiskal yang stabil, efektivitas PAD yang konsisten di atas 100%, serta pertumbuhan PAD yang pulih pasca pandemi. Meskipun sempat terdampak Covid-19 pada 2020 yang menyebabkan kontraksi PAD dan peningkatan ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Pemerintah Kota berhasil memulihkan kondisi melalui digitalisasi pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta optimalisasi aset daerah. Rasio desentralisasi fiskal juga menunjukkan tren naik, mencerminkan peran PAD yang semakin besar dalam struktur pendapatan daerah. Secara keseluruhan, meskipun masih menghadapi tantangan ketergantungan fiskal, strategi inovatif dan responsif yang dijalankan menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

Tren kinerja keuangan Kabupaten Sleman tahun 2019-2023 menunjukkan pemulihan yang positif setelah terdampak pandemi Covid-19. Rasio kemandirian keuangan sempat menurun drastis pada 2020-2021, namun membaik di 2022-2023 seiring meningkatnya PAD dari sektor jasa seperti hotel, restoran, dan pariwisata. Efektivitas PAD cukup stabil dengan rasio tinggi, mencerminkan perencanaan yang realistis dan dukungan digitalisasi sistem pembayaran. Pertumbuhan PAD juga menunjukkan tren membaik, terutama pada 2022 dengan lonjakan signifikan sebesar 32,03%, meskipun ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Rasio derajat desentralisasi fiskal fluktuatif, namun membaik pada dua tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Pemerintah Sleman terus mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat digitalisasi, dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif guna mendorong kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Tren kinerja keuangan Kabupaten Bantul selama 2019-2023 menunjukkan perbaikan

bertahap meskipun masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian fiskal dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Rasio kemandirian keuangan tetap berada di kategori rendah, namun PAD terus tumbuh secara positif terutama pascapandemi, dengan efektivitas PAD yang konsisten di atas 100%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada 2022, didorong oleh sektor pajak daerah dan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Meski demikian, ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi dengan rata-rata rasio di atas 74%, dan derajat desentralisasi fiskal tetap rendah karena dominasi pendapatan transfer. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan strategi seperti optimalisasi pemungutan PAD, digitalisasi layanan, serta peningkatan efisiensi belanja untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat otonomi fiskal secara berkelanjutan.

Tren kinerja keuangan Kabupaten Kulon Progo selama 2019-2023 menunjukkan upaya perbaikan yang bertahap meskipun masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian fiskal dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Rasio kemandirian keuangan tetap rendah dengan angka tertinggi hanya sekitar 25%, mencerminkan dominasi pendapatan transfer dalam struktur keuangan daerah. Efektivitas PAD sempat mencapai puncak pada 2021 sebesar 124%, namun masih fluktuatif dan dipengaruhi oleh terbatasnya potensi fiskal serta dampak pandemi. Pertumbuhan PAD juga tidak stabil, dengan lonjakan pada 2021 lalu melemah pada 2022 dan kembali tumbuh moderat pada 2023. Derajat desentralisasi fiskal berada pada kategori rendah sepanjang periode, meski sempat meningkat di 2022 berkat strategi optimalisasi pajak dan digitalisasi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan, Kulon Progo masih membutuhkan penguatan potensi PAD dan efisiensi fiskal untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat otonomi keuangan daerah.

Tren kinerja keuangan Kabupaten Gunungkidul selama 2019-2023 menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang sangat rendah dengan rata-rata rasio sekitar 15%, mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Meskipun efektivitas PAD tergolong sangat baik dan sempat mencapai 111% pada 2022, pertumbuhan PAD bersifat fluktuatif, dengan lonjakan pada 2022 namun kembali menurun pada 2023 akibat tekanan fiskal dan lemahnya sektor pariwisata. Ketergantungan fiskal selalu di atas 80%, menandakan dominasi transfer dalam struktur pendapatan daerah, dan derajat desentralisasi fiskal pun tetap rendah karena kontribusi PAD yang kecil. Pemerintah daerah berupaya memperkuat PAD melalui strategi intensifikasi, insentif wajib pajak, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan sektor layanan kesehatan serta pariwisata untuk mengurangi ketergantungan fiskal secara bertahap.

Rekomendasi

Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan kinerja keuangan paling solid di DIY pada periode 2019-2023 dan dapat dijadikan role model melalui digitalisasi perpajakan, transparansi anggaran, dan inovasi pelayanan publik. Pemerintah Kota perlu memperluas diversifikasi PAD, memanfaatkan aset idle, memperkuat kemitraan swasta, dan menjalin kerja sama regional untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki PAD tertinggi dan tingkat efektivitas efisien perlu mengatasi fluktuasi pertumbuhan PAD dan ketergantungan transfer dengan mengoptimalkan peran BUMD/BLUD serta memperluas sektor potensial seperti pariwisata, kuliner, dan ekonomi digital, disertai pembangunan infrastruktur dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Bantul dengan potensi ekonomi kreatif tinggi menghadapi tantangan rendahnya kemandirian fiskal dan perlu memperkuat sektor unggulan seperti kerajinan, wisata budaya, serta optimalisasi digitalisasi pembayaran dan revitalisasi pasar untuk mendukung pemerataan pembangunan. Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah dengan PAD terendah kedua perlu mengoptimalkan potensi kawasan sekitar YIA, mempercepat pembentukan BUMD, serta mendorong sektor agrowisata dan logistik, di samping meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat melalui strategi intensifikasi dan insentif

perpajakan. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat kemandirian dan desentralisasi terendah memerlukan pembangunan ekosistem pariwisata berbasis lokal, edukasi pajak, penetapan target PAD yang realistis, dan pemberdayaan desa melalui BUMDes, dengan dukungan intervensi afirmatif dari Pemprov DIY untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi kesenjangan wilayah.

KESIMPULAN

Hasil analisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi DIY selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan setiap daerah memiliki rata-rata dan kriteria yang bervariasi. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mencatat rata-rata masing-masing sebesar 60,03% dan 51,36%, dengan kemampuan keuangan sedang dan pola hubungan partisipatif, yang mencerminkan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Bantul menunjukkan tingkat kemandirian sebesar 30,93% dengan pola hubungan konsultatif, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul mencatat kemandirian terendah dengan pola hubungan instruktif, menandakan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat. Di sisi lain, tingkat efektivitas PAD seluruh kabupaten/kota di DIY berada dalam kategori sangat efektif karena seluruh rasio melebihi 100%, dengan Kulon Progo mencatat rata-rata tertinggi sebesar 113,11%, dan Gunungkidul terendah sebesar 106,40%. Meskipun demikian, pertumbuhan PAD bersifat fluktuatif, terutama pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang berdampak signifikan terhadap Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, masing-masing dengan penurunan sebesar -18,27% dan -18,91%. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2022, ketika Kabupaten Gunungkidul dan Sleman mencatat pertumbuhan tertinggi, serta Kabupaten Kulon Progo menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten selama lima tahun.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY selama periode 2019-2023 menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer, dengan persentase di atas 59%. Kabupaten Gunungkidul mencatat ketergantungan tertinggi sebesar 87,20% pada tahun 2021, sedangkan Kota Yogyakarta menjadi yang terendah dengan 59,75% pada tahun 2023. Tingginya ketergantungan ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, padahal rasio ideal seharusnya berada di bawah 50% agar struktur pendapatan lebih seimbang. Persentase derajat desentralisasi fiskal, yang mencerminkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan, juga menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum sepenuhnya mandiri secara fiskal. Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang mencapai desentralisasi fiskal “baik” sebesar 40,25% pada tahun 2023, diikuti Sleman dalam kategori “sedang” dengan rata-rata 33%, Bantul tergolong “cukup”, dan Kulon Progo serta Gunungkidul tetap dalam kategori “kurang”. Kondisi ini menandakan bahwa mayoritas daerah di DIY masih bergantung pada dana transfer dan perlu mendorong penguatan PAD untuk mendukung pembiayaan pemerintahan yang mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemerataan pembangunan di Provinsi DIY memerlukan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah, intervensi afirmatif dari pemerintah provinsi, dan sinergi kebijakan lintas wilayah. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan, digitalisasi layanan perpajakan, dan pengembangan sektor unggulan lokal seperti pariwisata, UMKM, dan BUMDes. Pemerintah provinsi berperan penting dalam memperkecil kesenjangan fiskal melalui dukungan teknis dan fiskal kepada daerah dengan kemandirian rendah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo. Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan kinerja keuangan terbaik dapat menjadi lokomotif pertumbuhan melalui kerja sama antar daerah dan transfer

inovasi. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, S., & Halim, A. (2022). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. October.
- [2] Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 2(1), 147-156. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i1.508>.
- [3] BPS, B. P. S. (2024). Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor. <https://yogyakarta.bps.go.id/id>.
- [4] Efriyanto, R., Herawati, H., & Sari, N. Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan, 4(2), 121-133. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i2.129>.
- [5] Halim, A., & Kusufi. (2014). Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik (2nd ed.). Salemba Empat.
- [6] Hidayati, Y., & Ali, H. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Mirai Management, 8(1), 250-257.
- [7] Indonesia, U.-U. R. (2014). UU Nomor 23 Tahun 2014.
- [8] Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition, 283-303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- [9] Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- [10] Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. ANDI.
- [11] Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. PT Rajagrafindo Persada.
- [12] Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D (Sutopo (ed.); Edisi Kedu). Alfabeta.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [13] Zulkarnain. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Cakrawala Repositori IMWI, 3(1), 61-74. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v3i1.40>